

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP),
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, DAN AKSESIBILITAS KEUANGAN
DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
(Survey Pada Seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Kulon Progo)**

**Oleh:
Ristandani Nuhnita Sari
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Email:
ristandani21@gmail.com**

ABSTRACT

This research is meant to test and prove the influence of government accounting standards application, financial statement presentation, and local government financial accessibility to the local government financial management accountability. The object of this research is SKPD of Kulon Progo Regency Government. The subjects of this research are the SKPD employees of the Kulon Progo Regency Government. The sample in this research was 30 SKPD with 96 respondents. The method of determining the sample in this research is to use purposive sampling. The data used in this research are primary data. Data collection techniques were carried out by method survey using a questionnaire. Data were analyzed using multiple regression analysis using SPSS for Windows version 15.0. The results showed that the government accounting standards application, financial statement presentation, and local government financial accessibility had a positive influence on the local government financial management accountability.

Keywords: Government Accounting Standards Application, Financial Statement Presentation, Accessibility Of Financial Reports, Local Government Financial Management Accountability

I. PENDAHULUAN

Fenomena yang sedang terjadi di Indonesia saat ini adalah mengenai adanya tuntutan akuntabilitas baik dalam pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal tersebut merupakan pengaruh dari adanya otonomi daerah. Adanya regulasi pengelolaan keuangan daerah dari pra-reformasi menuju reformasi menyebabkan adanya pergeseran dari pemerintahan sentralis menuju pemerintahan yang menerapkan asas desentralisasi sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan otonomi daerah.

Dasar dari pelaksanaan otonomi daerah tersebut adalah UU No. 32 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 22 Tahun 1999. Otonomi daerah menurut UU No. 23 Tahun 2004 ialah segala hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengurus sendiri segala urusan pemerintah dan kepentingan masyarakatnya yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Hehanussa (2015) mengungkapkan bahwa dampak dari adanya otonomi daerah tersebut adalah adanya perubahan yang signifikan untuk komposisi pengeluaran anggaran baik pada pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Dengan demikian, maka pemerintah dituntut untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dengan penuh tanggungjawab. Selain itu, adanya wewenang untuk mengelola sendiri keuangan setiap pemerintah daerah juga akan diikuti oleh risiko adanya tindakan penyalahgunaan wewenang seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) seperti yang diungkapkan oleh Pratolo dan Jatmiko (2017).

Risiko tersebut sejalan dengan permasalahan yang ada di Indonesia saat ini, yaitu maraknya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi. Berdasarkan indeks persepsi korupsi 2017 dalam laporan tahunan Transparansi Internasional yang menyusun peringkat korupsi 180 negara di dunia dengan basis penilaian terkait layanan publik disebuah negara, Indonesia menempati urutan ke-96. Pernyataan tersebut juga diiringi dengan penjelasan bahwa korupsi semakin menjadi masalah yang global dan banyak negara yang dinilai lamban dalam memerangi korupsi. Di Indonesia sendiri korupsi merupakan suatu hal semakin membuat masyarakat geram. Hal tersebut

sesuai dengan pendapat Lestiawan dan Jatmiko (2016) bahwa beberapa tahun terakhir sedang marak terjadi tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

Salah satu langkah untuk mencegah dan mengantisipasi adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam lingkungan pemerintahan adalah dengan mewujudkan akuntabilitas publik. Pemerintah daerah merupakan pihak yang diberi amanah oleh publik sebagai pihak yang memberikan amanah, sehingga pengelolaan keuangan yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dimaknai dengan sebuah pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara bertanggungjawab, di mana pemerintah harus menyajikan segala aktivitas dan kinerja keuangan secara transparan. Dengan adanya akuntabilitas tersebut juga dapat berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat diwujudkan dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintah. Pemerintah daerah harus melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang berlaku, yang diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010. Ichlas, Basri, dan Arfan (2014) memaparkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah sebuah landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan atas penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pencapaian akuntabilitas dapat diwujudkan. Penerapan SAP dapat diwujudkan dengan penggunaan basis akrual dalam pencatatan laporan keuangan.

Faktor lain yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah dilakukannya penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut disajikan dengan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu disajikan secara relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan tidak hanya terkait dengan penerapan SAP dan penyajian laporan keuangan, namun juga disertai dengan kemudahan akses

oleh publik terhadap laporan keuangan tersebut. Fauziyah dan Handayani (2017) mengungkapkan bahwa jika sebuah laporan keuangan pemerintah daerah disajikan semakin baik dan terdapat kemudahan untuk mengaksesnya, maka dampaknya adalah adanya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas dimaknai sebagai suatu kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan akses atas laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudahan akses tersebut merupakan bentuk bukti pertanggungjawaban bahwa keuangan daerah telah dikelola dengan baik, jujur, dan terbuka. Dengan demikian, maka informasi keuangan yang disajikan dengan baik, terbuka, dan sesuai dengan SAP, serta publik memperoleh kemudahan dalam mengaksesnya, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat. Hal tersebut juga dapat menjadi sarana untuk menanggulangi permasalahan penyalahgunaan jabatan dan kasus korupsi yang saat ini sedang marak terjadi.

Salah satu media pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya adalah melalui laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya, dan akan diberikan opini. Opini yang diberikan tersebut merupakan suatu bentuk apresiasi dari BPK atas hasil laporan keuangan yang telah diperiksa. Berdasarkan perkembangan opini BPK Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Tahun 2012-2016, menjelaskan bahwa untuk Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam 5 tahun terakhir (Sumber : IHPS BPK RI Semester II Tahun 2017). Namun, untuk pemerintah kabupaten masih belum merata dalam pencapaian opini WTP. Oleh karena itu, penelitian ini menjadikan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai objek penelitian. Salah satu alasannya adalah bahwa Kabupaten Kulon Progo baru dua kali mendapatkan opini WTP dari BPK RI. Meskipun sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terdapat hal-hal yang

menjadi perhatian dan adanya rekomendasi dari BPK RI yang ditujukan kepada Bupati Kulon Progo.

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian *intern* dalam penyusunan laporan keuangan, di mana pengelolaan kas pada Bendahara Pengeluaran SKPD di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo belum memadai. Selain itu, BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu adanya penggunaan pungutan pajak oleh Bendahara Pengeluaran UPTD BLUD Puskesmas Wates untuk keperluan pribadi sebesar Rp 41.482.062,00. (Sumber : www.kulonprogokab.go.id).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menguji kembali pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, penyajian laporan keuangan daerah, dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sehingga, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan, penyajian laporan keuangan daerah, dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

II. METODE PENELITIAN.

Obyek dan Subyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan subyek dalam penelitian ini adalah pegawai yang berada di SKPD Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung yang diperoleh dari tangan pertama pihak-pihak yang terkait, dengan menggunakan butir-butir pertanyaan melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner dibagikan secara langsung kepada reponden pada masing-

masing SKPD Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan sampel yang telah ditentukan.

Teknik Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tersebut berdasarkan *judgment* atau kuota tertentu. (Jogiyanto, 2016). Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah SKPD Kabupaten Kulon Progo yang menduduki jabatan sebagai Sekretaris, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi yang telah bekerja di SKPD tersebut minimal selama 1 tahun, dengan pendidikan minimal D3. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD Kabupaten Kulon Progo yang berjumlah 43. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin Afryansyah (2013) dengan nilai $e^2 = 10\%$. Rumusnya adalah :

$$\begin{aligned}n &= \frac{N}{1+(N.e^2)} \\n &= \frac{43}{1+(43.10\%^2)} \\&= 30,07 \text{ atau } 30\end{aligned}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e^2 = Nilai kelonggaran

Dengan demikian, maka jumlah sampel adalah sebanyak 30 SKPD dengan membagikan masing-masing 4 kuesioner pada setiap SKPD. Sehingga, jumlah responden adalah sebanyak 120 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *survey*, dengan menyebarkan kuesioner secara langsung oleh peneliti kepada masing-masing responden di SKPD Kabupaten Kulon Progo.

Jenis Skala yang digunakan dalam kuesioner ini adalah menggunakan *Skala Likert*, yaitu skala yang menggunakan 5 poin skala dengan interval yang sama dalam mengukur respons subjek (Jogiyanto, 2016).

Uji Kualitas Instrumen

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ialah statistik gambaran fenomena atau karakteristik dari data (Jogiyanto, 2016). Penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif yang terdiri dari nilai minimum, nilai maksimum, *mean*, dan standar deviasi.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji yang dilakukan mengenai tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan. Instrumen dapat dikatakan valid apabila instrumen tersebut benar-benar tepat untuk mengukur apa yang akan diukur (Nazaruddin dan Basuki, 2017). Syarat suatu instrumen dapat dikatakan valid adalah apabila nilai *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA) $> 0,50$.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji mengenai suatu pengukur yang menunjukkan stabilitas ukur suatu konsep dan berguna untuk mengakses “kebaikan” dari suatu pengukur (Sekaran, 2017). Suatu instrumen memiliki realibilitas yang memadai apabila koefisien *Cronbach's alpha* $> 0,70$.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah pada model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai data berdistribusi normal atau tidak. Selain itu juga merupakan asumsi bahwa setiap variabel berdistribusi normal. Penelitian ini menggunakan *One-Sample Kolmogorov Smirnov* (KS) dengan

koefisien *Asymp. Sig. (2-tailed)* > *alpha* 0,05, yang memiliki arti bahwa data tersebut berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji model regresi apakah terdapat adanya hubungan linear antar variabel independen. Dalam penelitian ini, pengujian multikolinearitas menggunakan nilai *tolerance* > 0,10 dan *variance inflation factor* (VIF) < 10.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah pada model regresi terdapat adanya ketidaksamaan varian untuk semua pengamatan, atau terdapat pengaruh variabel bebas dengan nilai mutlak residual, sehingga penaksiran koefisien regresi menjadi tidak efektif dan menghasilkan penaksiran yang kurang akurat. Dalam menguji heteroskedastisitas, penelitian ini menggunakan uji *Glejser*, yaitu dilakukan dengan meregres uji absolut residual dengan variabel independen yang digunakan. Apabila pengujian menunjukkan hasil *Sig* > *alpha* 0,05 maka bebas dari heteroskedastisitas.

4. Uji Hipotesis dan Analisis Data

a. Analisis Regresi Berganda

Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda, dan diuji dengan tingkat signifikan 5%. Regresi linear berganda merupakan analisis regresi dengan dua atau lebih variabel bebas (Nazaruddin dan Basuki, 2017). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (X1), Penyajian Laporan Keuangan (X2), dan Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3). Sedangkan variabel dependennya adalah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y). Persamaan regresi untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

α = Konstanta

$\beta_{1,2,3}$ = Koefisien regresi

X1 = Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan

X2 = Penyajian Laporan
Keuangan

X3 = Aksesibilitas Laporan
Keuangan

e = Error

b. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Uji koefisien determinasi (*Adjusted R Square*), digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (independen) mampu menjelaskan variabel terikat (dependen).

c. Uji F (*f-test*)

Uji F disebut juga sebagai uji simultan, yang digunakan untuk menguji dan membuktikan bahwa variabel independen secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen. Dapat dikatakan terdapat pengaruh secara bersama-sama antar variabel independen terhadap variabel dependen apabila nilai *Sig F* < *alpha* 0,05.

d. Uji t (*t-test*)

Uji t disebut juga sebagai uji parsial, yang digunakan untuk menguji dan membuktikan bahwa masing-masing variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Apabila nilai *Sig t* < *alpha* 0,05 dan koefisien beta memiliki arah yang sama dengan hipotesis maka hipotesis diterima. Sebaliknya, apabila nilai *Sig t* > *alpha* 0,05 dan koefisien beta memiliki arah yang berbeda dengan hipotesis maka hipotesis ditolak.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Deskripsi Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer, yang diperoleh dengan melalui penyebaran kuesioner secara langsung oleh peneliti kepada SKPD Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Kuesioner disebarakan kepada SKPD yang terdiri dari 4 badan, 1 inspektorat, 19 dinas, 1 Satuan Polisi Pamong Praja, 1 kantor, dan 4 kecamatan. Berikut analisis pengembalian kuesioner:

Tabel 1
Analisis Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Total penyebaran kuesioner	120
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	11
Jumlah kuesioner yang kembali	109
Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah / tidak lengkap	13
Jumlah kuesioner yang dapat diolah	96
Tingkat pengembalian kuesioner	90,83 %

Sumber: Data kuesioner penelitian

Analisis Karakteristik Responden

Berikut adalah analisis karakteristik responden berdasarkan kriteria jenis kelamin, usia, jabatan kerja, tingkat pendidikan, serta lama bekerja :

Analisis Statistik Deskriptif

Berikut adalah hasil uji statistik deskriptif untuk variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan, penyajian laporan keuangan daerah, dan aksesibilitas laporan keuangan daerah:

Tabel 2
Hasil Uji Statistik Deskripti

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	96	42	70	60,30	6,219
Penyajian Laporan Keuangan Daerah	96	24	40	34,22	3,790
Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	96	7	15	12,78	1,706
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	96	24	40	34,97	3,404
Valid N (listwise)	96				

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Hasil Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan, kuesioner dalam penelitian ini dapat dikatakan valid.

Tabel 3
Hasil Uji Validitas

Variabel	Nilai KMO	Standar Validitas	Keterangan
SAP	0,851	<i>Alpha 0,05</i>	<i>Valid</i>
PLK	0,801	<i>Alpha 0,05</i>	<i>Valid</i>
ALK	0,706	<i>Alpha 0,05</i>	<i>Valid</i>
APK	0,772	<i>Alpha 0,05</i>	<i>Valid</i>

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Hasil Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan, kuesioner dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel.

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Standar Reliabel	Keterangan
SAP	0,916	0,70	<i>Reliabel</i>
PLK	0,861	0,70	<i>Reliabel</i>
ALK	0,820	0,70	<i>Reliabel</i>
APK	0,837	0,70	<i>Reliabel</i>

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Hasil Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil semua uji asumsi klasik yang telah dilakukan, data dalam penelitian ini berdistribusi normal, serta tidak terjadi multikolinearitas maupun heteroskedastisitas.

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov-Tes	Nilai Sig	Keterangan
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,364	Berdistribusi Normal

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Nilai <i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
SAP	0,507	1,973	Tidak Terjadi Multikolinearitas
PLK	0,434	2,303	Tidak Terjadi Multikolinearitas
ALK	0,630	1,587	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Tabel 7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Standar	Keterangan
SAP	0,102	<i>Alpha</i> 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
PLK	0,129	<i>Alpha</i> 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
ALK	0,054	<i>Alpha</i> 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Hasil Uji Hipotesis

Hasil uji regresi berganda disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 8
Ringkasan Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t	Sig	Keterangan
Konstanta	6,072	2,855	0,005	
SAP	0,308	6,685	0,000	Positif
PLK	0,177	2,165	0,033	Positif
ALK	0,337	2,238	0,028	Positif

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel pengujian linear berganda di atas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$APK = 6,072 + 0,308 \text{ SAP} + 0,177 \text{ PLK} + 0,337 \text{ ALK} + e$$

Pembahasan

1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil pengujian yang menunjukkan nilai *sig* (0,000) < *alpha* 0,05, dan bertanda

positif. Sehingga memiliki artian bahwa pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menerapkan standar akuntansi pemerintahan dengan baik dalam menyusun laporan keuangan, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. SKPD Kabupaten telah menerapkan basis akrual dalam pencatatan laporan keuangan, penyajian dengan wajar, laporan keuangan dilaporkan sesuai dengan periode yang ditentukan, serta disajikannya informasi yang dibutuhkan oleh pengguna secara lengkap.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan akan menjamin bahwa penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Adhi dan Suhardjo, 2013). Sehingga, adanya penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan akan memberikan jaminan bahwa laporan keuangan yang disusun memiliki kualifikasi informasi keuangan yang berguna bagi para pengguna yang membutuhkannya. Adanya informasi yang berguna tersebut akan menunjang terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Standar akuntansi pemerintahan merupakan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan serta melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pencapaian akuntabilitas dapat diwujudkan. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, SKPD Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menerapkan standar akuntansi pemerintah dengan baik dan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Meskipun terdapat peralihan dari SAP berbasis kas menuju SAP berbasis akrual, pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan tetap dapat menerapkan SAP dalam menyusun laporan keuangan daerah.

Dengan demikian, maka penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara positif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Zeyn (2011) serta penelitian Ichlas, Basri, dan Arfan (2014) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

2. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil pengujian yang menunjukkan nilai *sig* (0,033) < *alpha* 0,05, dan bertanda positif. Artinya, SKPD Kabupaten Kulon Progo telah mampu menyajikan laporan keuangan dengan baik, di mana SKPD telah mampu menyusun laporan keuangan secara lengkap, tepat waktu dalam menyelesaikan laporan keuangan, menyajikan informasi dengan jujur, laporan keuangan dapat dibandingkan, laporan keuangan SKPD dapat dijadikan tolok ukur dalam menyusun anggaran tahun berikutnya, informasi keuangan terbebas dari salah saji material, serta informasi laporan keuangan mampu memenuhi kebutuhan penggunanya.

Menurut Mardiasmo (2009), laporan keuangan sektor publik merupakan salah satu komponen dalam rangka terciptanya akuntabilitas publik. Pemerintah daerah sebagai pihak yang menerima amanah harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan melalui laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan yang baik merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Sande, 2013). Dengan demikian, menunjukkan bahwa semakin baik penyajian laporan keuangan yang dilakukan maka akan berimplikasi terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kulon Progo.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Fauziyah dan Handayani (2017); Hehanussa (2015); dan Subekti, Rizani, dan Novriyandana (2015). Ketiga penelitian tersebut menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil pengujian yang menunjukkan nilai *sig* (0,033) < *alpha* 0,05, dan bertanda positif. Artinya, SKPD Kabupaten Kulon Progo telah mampu menyajikan laporan keuangan dengan baik, di mana SKPD telah mampu menyusun laporan keuangan secara lengkap, tepat waktu dalam menyelesaikan laporan keuangan, menyajikan informasi dengan jujur, laporan keuangan dapat dibandingkan, laporan keuangan SKPD dapat dijadikan tolok ukur dalam menyusun anggaran tahun berikutnya, informasi keuangan terbebas dari salah saji material, serta informasi laporan keuangan mampu memenuhi kebutuhan penggunanya.

Menurut Mardiasmo (2009), laporan keuangan sektor publik merupakan salah satu komponen dalam rangka terciptanya akuntabilitas publik. Pemerintah daerah sebagai pihak yang menerima amanah harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan melalui laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan yang baik merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Sande, 2013). Dengan demikian, menunjukkan bahwa semakin baik penyajian laporan keuangan yang dilakukan maka akan berimplikasi terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kulon Progo.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Fauziyah dan Handayani (2017); Hehanussa (2015); dan Subekti, Rizani, dan Novriyandana (2015). Ketiga penelitian tersebut menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary	Nilai	Keterangan
Ajusted R Square	0,660	Variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 66%

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Tabel tersebut menjelaskan bahwa variabel independen yaitu variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan, penyajian laporan keuangan daerah, dan aksesibilitas laporan keuangan daerah mampu menjelaskan variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 66%, dan sisanya yaitu sebesar $(100\% - 66\% = 34\%)$ dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian.

Hasil Uji F

Tabel 10
Hasil Uji F

Anova	Nilai	Keterangan
Sig. F	0,000	Variabel-variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen secara simultan

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Sig F adalah sebesar $0,000 < \alpha 0,05$. Hal tersebut menjelaskan bahwa variabel-variabel independen yaitu

standar akuntansi pemerintahan, penyajian laporan keuangan daerah, dan aksesibilitas laporan keuangan daerah mampu secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada 30 SKPD Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, maka diperoleh kesimpulan penerapan standar akuntansi pemerintahan, penyajian laporan keuangan daerah, dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya dilakukan di wilayah Kabupaten Kulon Progo, sehingga lebih terbatas generalisasinya
2. Penelitian ini hanya menggunakan metode survey dengan membagikan kuesioner tanpa ikut terlibat langsung dengan melalui wawancara, sehingga informasi yang disampaikan oleh responden rentan terhadap bias.
3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel independen penerapan standar akuntansi pemerintahan, penyajian laporan keuangan daerah, dan aksesibilitas laporan keuangan daerah, tidak menggunakan variabel lain dan tidak menggunakan variabel intervening maupun moderating.

Saran

1. Pada penelitian berikutnya, dapat memperluas objek penelitian dengan menambah lokasi penelitian lebih dari satu kabupaten.
2. Penelitian mendatang sebaiknya juga menggunakan metode wawancara secara langsung untuk mengumpulkan data penelitian
3. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, variabel independen yang diteliti memiliki pengaruh terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan

keuangan daerah sebesar 66%, sehingga masih terdapat 34% dari variabel-variabel di luar model. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel-variabel lain yang belum termasuk dalam model regresi dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, D. K., & Suhardjo, Y. (2013). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual). *Jurnal Stie Semarang*, 5(3), 93-111.
- Baldric. 2017. *Akuntansi Sektor Publik Serta Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Donaldson. Lex, Davis James H. (1991) "Stewardship Theory Or Agency Theory : Ceo Covernance And Shareholders Return" *Australian Journal Of Management*. Vol.16 Iss. 1.
- Fauziyah, M. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(6).
- Hehanussa, S. J. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. In *Conference In Business, Accounting, And Management (Cbam)* (Vol. 2, No. 1, Pp. 82-90).
- Ichlas, M., Basri, H., & Arfan, M. (2014). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 3(4).
- Jogiyanto. 2016. *Pedoman Survei Kuesioner*. Yogyakarta: BPFE UGM
- Jogiyanto. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah kaprah dan pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diambil dari <https://kbbi.web.id> tanggal 10 Juli 2018 pk 12.40 WIB.
- Lestiawan, H. Y., & Jatmiko, B. (2015). Key Success Factor Good Government Governance Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah (Survey Pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul). *Maksimum*, 5(1).

- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nazaruddin, I., & Basuki, A. T., 2017, *Analisis Statistik Dengan SPSS*. Yogyakarta: Danisa Media.
- Pratolo, S., & Jatmiko, B. 2017. *Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Pratolo, S., Jatmiko, B., & Anwar, M. (2016). *Financial Statement Public Sectors Berbasis Web-Ict: Pola Pemetaan Laporan Keuangan Melalui Web-Ict Untuk Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas (Studi Kasus Skpd Kabupaten Bantul)*.
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Sande, P. (2013). Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Studi empiris pada pemerintah Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Sekaran, U., & Bougie, R. 2017. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subekti, I. A., Rizani, F., & Novriyandana, R. (2017). Pengaruh Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Studi Persepsi Pengguna Eksternal Laporan Keuangan Kota Banjarmasin). *Jurnal Sains Akuntansi Indonesia*, 2(1), 72-84.
- Sumiyati. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah (Studi Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir). *Jom FEKON Vol.2 No. 2*.
- Wahida, N. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar.

www.kulonprogokab.go.id. Diakses tanggal 5 Mei 2018 pk 10.34 WIB.

Zeyn, E. (2014). Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan. *Trikonomika Journal*, 10(1), 52-62.